

RETORIKA KEPRESIDENAN DAN KECEMASAN GEOPOLITIK (ANALISIS KOMUNIKASI FILOSOFIS ATAS DISKURSUS PRESIDEN AMERIKA SERIKAT TERHADAP IRAN SERTA RESONANSINYA DI CINA, KOREA UTARA, DAN TIMUR TENGAH)

Herman

Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta

e-mail: herman.hrm@bsi.ac.id

Diterima: 13/5/2026; Direvisi: 30/5/2026; Diterbitkan: 1/8/2026

ABSTRAK

Meningkatnya intensitas retorika politik dalam hubungan Amerika Serikat dan Iran memperlihatkan bahwa komunikasi kepresidenan tidak hanya berfungsi menyampaikan arah kebijakan luar negeri, tetapi juga berperan dalam membentuk persepsi internasional mengenai ancaman, legitimasi, dan tatanan geopolitik. Atas dasar itu, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana retorika Presiden Amerika Serikat memproduksi makna politik serta menghasilkan resonansi wacana di Cina, Korea Utara, dan kawasan Timur Tengah melalui perspektif filsafat komunikasi. Penelitian menerapkan pendekatan kualitatif dengan paradigma *interpretive* kritis serta menggunakan *Critical Discourse Analysis* Norman Fairclough yang diperkaya perspektif *power/knowledge* Michel Foucault. Data dihimpun dari pidato resmi Presiden Amerika Serikat, dokumen kebijakan, pernyataan diplomatik, dan pemberitaan media internasional, kemudian dianalisis melalui tahapan analisis teks, praktik diskursif, praktik sosial, serta diperkuat dengan triangulasi sumber dan *cross-checking* antardokumen. Analisis menghasilkan lima tema utama, yaitu narasi ancaman terhadap Iran, representasi kekuatan militer sebagai sumber legitimasi politik, pembentukan identitas geopolitik melalui praktik subjektivasi, normalisasi ketidakpastian sebagai strategi komunikasi politik, serta resonansi wacana yang dimaknai secara beragam oleh aktor internasional sesuai kepentingan strategis masing-masing. Temuan tersebut menegaskan bahwa retorika kepresidenan tidak sekadar merepresentasikan dinamika politik internasional, melainkan turut membentuk konstruksi ancaman, memproduksi pengetahuan geopolitik, dan memengaruhi orientasi komunikasi politik global melalui mekanisme *power/knowledge* yang bekerja secara diskursif.

Kata Kunci: Retorika Kepresidenan, *Critical Discourse Analysis*, Filsafat Komunikasi

ABSTRACT

Escalating political rhetoric in relations between the United States and Iran illustrates that presidential communication functions not merely as a vehicle for conveying foreign policy, but also as a mechanism for shaping international perceptions of threats, legitimacy, and the geopolitical order. Against this backdrop, this study explores how the rhetoric of the President of the United States produces political meaning and generates discursive resonance across China, North Korea, and the Middle East from the perspective of the philosophy of communication. The research adopts a qualitative approach within a critical interpretive paradigm and employs Norman Fairclough's *Critical Discourse Analysis* enriched by Michel Foucault's *power/knowledge* perspective. Data were collected from official presidential speeches, policy documents, diplomatic statements, and international media coverage, and were analyzed through the stages of textual analysis, discursive practice, and social practice,

supported by source triangulation and cross-checking across documents. The analysis identifies five major themes: the construction of threat narratives toward Iran, the representation of military power as a source of political legitimacy, the formation of geopolitical identities through processes of subjectivation, the normalization of uncertainty as a political communication strategy, and the emergence of discursive resonance interpreted differently by international actors according to their respective strategic interests. These findings demonstrate that presidential rhetoric does not merely represent international political dynamics; rather, it actively constructs threat perceptions, produces geopolitical knowledge, and influences the orientation of global political communication through the discursive operation of power/knowledge.

Keywords: *Presidential Rhetoric, Critical Discourse Analysis, Philosophy of Communication*

PENDAHULUAN

Perubahan lanskap komunikasi pada era digital telah menggeser cara negara menjalankan praktik politik luar negeri dari sekadar penyampaian kebijakan menuju proses produksi makna yang berlangsung secara simultan di ruang publik global. Dalam konfigurasi tersebut, pidato kepala negara tidak lagi berhenti sebagai ekspresi sikap resmi pemerintah, melainkan menjadi bagian dari mekanisme diplomasi yang bekerja melalui pembentukan persepsi, negosiasi legitimasi, dan penyusunan narasi strategis yang memengaruhi perilaku aktor internasional. Dinamika tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi politik beroperasi sebagai arena tempat kepentingan negara, relasi kekuasaan, dan orientasi kebijakan saling dipertukarkan melalui praktik diskursif yang terus direproduksi (Marzuki et al., 2025). Oleh karena itu, pembacaan terhadap retorika kepresidenan tidak cukup dilakukan pada tataran linguistik semata, tetapi perlu diarahkan pada bagaimana bahasa menghasilkan konstruksi realitas yang berdampak pada konfigurasi politik internasional, terutama ketika komunikasi berlangsung dalam situasi konflik yang melibatkan kepentingan keamanan, diplomasi, dan stabilitas kawasan.

Di antara berbagai dinamika geopolitik kontemporer, relasi Amerika Serikat dan Iran menawarkan ruang analisis yang memperlihatkan bagaimana bahasa politik memperoleh daya pengaruh yang melampaui fungsi komunikatifnya. Pernyataan resmi Presiden Amerika Serikat mengenai Iran secara berulang menjadi rujukan media internasional, pemerintah negara lain, maupun publik global dalam menafsirkan arah eskalasi konflik di Timur Tengah. Proses tersebut memperlihatkan bahwa narasi politik bekerja melalui mekanisme *framing* yang tidak hanya mengidentifikasi ancaman, tetapi juga membentuk cara komunitas internasional mengonstruksi legitimasi terhadap tindakan politik tertentu (Alfriandi, 2024; Zahra et al., 2025). Dengan demikian, retorika kepresidenan dapat dipahami sebagai praktik komunikasi strategis yang berkontribusi terhadap pembentukan makna geopolitik, karena setiap pilihan bahasa membawa kepentingan ideologis sekaligus membuka ruang bagi reproduksi relasi kekuasaan dalam sistem internasional yang terus berubah.

Kajian mengenai retorika politik selama satu dekade terakhir berkembang melalui beragam perspektif yang memperlihatkan keluasan fungsi bahasa dalam praktik kekuasaan, meskipun fokus analisisnya masih tersebar pada konteks yang berbeda-beda. Isa (2024) menguraikan bagaimana retorika dalam debat calon presiden digunakan untuk membangun legitimasi politik dan memengaruhi preferensi publik, sedangkan Trisnaningtyas dan Anshori (2026) menempatkan pidato presiden sebagai representasi kepemimpinan yang membentuk narasi nasional. Pada dimensi lain, Suryakusuma et al. (2026) bersama Noval dan Sirangki

(2026) memperlihatkan bahwa perspektif Michel Foucault membuka ruang pembacaan mengenai keterhubungan antara wacana, pengetahuan, dan kekuasaan dalam komunikasi politik, sementara Al-Khawaldeh et al. (2023) menunjukkan bagaimana strategi retorika Presiden Joe Biden dibangun melalui pilihan bahasa yang menghasilkan efek persuasif dan legitimatif. Pembahasan mengenai dimensi geopolitik juga memperoleh penguatan melalui Ben Messahel (2025) yang menegaskan bahwa *critical geopolitics* menempatkan diskursus sebagai instrumen utama dalam membentuk realitas hubungan internasional, sehingga bahasa politik tidak hanya menggambarkan dunia, melainkan ikut menciptakan cara dunia dipahami.

Meskipun perkembangan kajian tersebut memperkaya pemahaman mengenai komunikasi politik, masih terdapat ruang konseptual yang belum banyak dijelaskan secara komprehensif. Sebagian besar penelitian memusatkan perhatian pada strategi persuasi, pembentukan citra politik, komunikasi domestik, maupun kebijakan luar negeri sebagai keluaran politik, sedangkan pembahasan mengenai retorika kepresidenan sebagai praktik produksi realitas yang bekerja melalui relasi pengetahuan dan kekuasaan masih relatif terbatas. Penelitian mengenai konflik Amerika Serikat–Iran pun lebih sering diarahkan pada propaganda, komunikasi politik digital, atau analisis *framing* media (Syaf et al., 2026; Anisa & Atman, 2025), sehingga belum memberikan penjelasan memadai mengenai bagaimana retorika presiden menghasilkan resonansi diskursif yang memengaruhi konstruksi geopolitik di Cina, Korea Utara, maupun kawasan Timur Tengah. Berangkat dari ruang konseptual tersebut, penelitian ini memosisikan sintesis antara filsafat komunikasi, teori diskursus Michel Foucault, dan perspektif *critical geopolitics* sebagai kerangka analitis untuk menjelaskan bahwa retorika Presiden Amerika Serikat tidak sekadar merepresentasikan dinamika politik internasional, tetapi juga memproduksi pengetahuan, membangun legitimasi, serta membentuk orientasi geopolitik global melalui mekanisme diskursif yang terus direproduksi.

Memahami retorika kepresidenan sebagai praktik komunikasi internasional menuntut cara pandang yang tidak memisahkan bahasa dari relasi sosial yang melahirkannya. Dalam horizon filsafat komunikasi, ujaran politik selalu beroperasi sebagai tindakan sosial yang berpotensi mengubah cara aktor internasional mendefinisikan objek, mengklasifikasikan ancaman, sekaligus menentukan batas-batas legitimasi suatu kebijakan. Pemikiran Michel Foucault memberikan landasan untuk membaca proses tersebut melalui relasi *power/knowledge*, ketika diskursus membentuk *regime of truth* yang mengarahkan apa yang dianggap benar, sah, dan layak diterima dalam ruang publik global. Perspektif tersebut memperoleh relevansi dalam konteks hubungan Amerika Serikat–Iran karena pernyataan presiden tidak hanya menyampaikan posisi diplomatik pemerintah, tetapi juga membangun pengetahuan kolektif mengenai konflik yang kemudian direproduksi oleh media, lembaga politik, maupun masyarakat internasional, sebagaimana juga disinggung oleh Noval dan Sirangki (2026) serta diperkaya melalui pendekatan *critical geopolitics* yang dikembangkan Ben Messahel (2025).

Implikasi retorika politik menjadi semakin kompleks ketika bahasa yang diproduksi oleh pemimpin negara berinteraksi dengan dinamika hubungan internasional yang berlangsung secara cepat dan saling terhubung. Ouyang dan Morgan (2023) memperlihatkan bahwa retorika Presiden Amerika Serikat memiliki keterkaitan erat dengan orientasi kebijakan luar negeri karena legitimasi politik sering kali dibangun melalui narasi sebelum diterjemahkan menjadi tindakan diplomatik. Pada saat yang sama, konflik Amerika Serikat–Iran berkembang melalui kompetisi narasi yang tidak hanya berlangsung pada forum diplomasi formal, tetapi juga menyebar ke ruang komunikasi digital, sehingga berbagai aktor dapat mereproduksi maupun

menafsirkan ulang pesan politik yang beredar (Syaf et al., 2026). Perspektif tersebut beririsan dengan uraian Zahra et al. (2025) yang menjelaskan bahwa persaingan geopolitik kontemporer menjadikan komunikasi internasional sebagai ruang perebutan pengaruh, sehingga setiap pernyataan politik berpotensi menghasilkan resonansi yang melampaui batas teritorial negara asalnya dan membentuk konfigurasi persepsi pada tingkat global.

Berangkat dari perkembangan konseptual tersebut, penelitian ini mengambil posisi yang berbeda dibandingkan berbagai studi sebelumnya. Kajian terdahulu lebih banyak memusatkan perhatian pada retorika sebagai instrumen persuasi politik, pembentukan citra kepemimpinan, praktik *framing*, maupun komunikasi diplomatik dalam konteks tertentu (Isa, 2024; Alfriandi, 2024; Suryakusuma et al., 2026). Penelitian lain juga mengulas sekuritisasi, representasi ancaman melalui media visual, serta konstruksi kepahlawanan dalam komunikasi politik pada wilayah konflik (Anisa & Atman, 2025; Syahriar & Marzaman, 2026), tetapi belum menghubungkan secara sistematis bagaimana retorika Presiden Amerika Serikat terhadap Iran menghasilkan resonansi diskursif yang memengaruhi konstruksi geopolitik di Cina, Korea Utara, dan kawasan Timur Tengah melalui sintesis filsafat komunikasi, teori diskursus Michel Foucault, serta perspektif *critical geopolitics*. Dengan demikian, nilai kebaruan penelitian ini tidak hanya terletak pada objek kajian, melainkan juga pada integrasi kerangka konseptual yang memungkinkan retorika kepresidenan dibaca sebagai mekanisme produksi realitas, legitimasi politik, dan reproduksi relasi kekuasaan dalam sistem internasional secara simultan.

Atas dasar kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis retorika Presiden Amerika Serikat terhadap Iran melalui perspektif filsafat komunikasi dengan menjadikan teori diskursus Michel Foucault sebagai perangkat analisis utama. Fokus analisis tidak berhenti pada identifikasi pilihan bahasa atau strategi komunikasi, tetapi diperluas hingga menelaah bagaimana praktik diskursif membentuk konstruksi ancaman, menghasilkan *regime of truth*, serta mereproduksi relasi kekuasaan dalam konteks geopolitik internasional. Selain menguraikan dinamika tersebut, penelitian ini juga menelusuri resonansi retorika kepresidenan terhadap perkembangan komunikasi politik di Cina, Korea Utara, dan kawasan Timur Tengah sebagai bentuk perluasan makna yang lahir dari interaksi berbagai aktor dalam ruang publik global. Kontribusi yang diharapkan bukan sekadar memperkaya diskursus komunikasi politik dan hubungan internasional, melainkan juga memperluas horizon filsafat komunikasi melalui penjelasan bahwa bahasa politik merupakan instrumen strategis yang secara bersamaan menghasilkan pengetahuan, membentuk legitimasi, dan mengonstruksi orientasi geopolitik pada tingkat global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memusatkan perhatian pada bagaimana retorika Presiden Amerika Serikat terhadap Iran membentuk konstruksi makna dalam komunikasi politik internasional, sehingga pendekatan kualitatif dengan paradigma *interpretive* kritis dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap proses tersebut. Analisis dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang merepresentasikan komunikasi politik kepresidenan, meliputi pidato resmi Presiden Amerika Serikat, pernyataan diplomatik, dokumen kebijakan, dan pemberitaan media internasional yang membahas isu Iran pada periode penelitian. Seluruh dokumen diperoleh melalui teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan empat kriteria, yaitu keterkaitan langsung dengan isu Iran, memuat pernyataan resmi Presiden Amerika Serikat, memiliki relevansi terhadap komunikasi politik internasional, serta menunjukkan keterhubungan dengan dinamika geopolitik di Cina, Korea Utara, dan kawasan Timur Tengah. Data primer bersumber

dari dokumen resmi pemerintah Amerika Serikat, sedangkan artikel ilmiah, buku, dan publikasi media internasional digunakan sebagai data sekunder untuk memperkaya konteks interpretasi. Seluruh sumber yang dianalisis merupakan dokumen yang tersedia untuk publik sehingga penelitian ini tidak memerlukan prosedur persetujuan etik.

Proses pengumpulan data diawali dengan penelusuran, penghimpunan, dan pengelompokan seluruh dokumen sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan berulang untuk memperoleh pemahaman terhadap pola komunikasi yang muncul. Selama proses tersebut, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang dibantu oleh pedoman kategorisasi data untuk mengidentifikasi bentuk retorika, konstruksi ancaman, legitimasi politik, relasi kekuasaan, *regime of truth*, dan resonansi geopolitik yang termuat dalam setiap dokumen. Informasi yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian dieliminasi melalui proses reduksi sehingga hanya narasi yang memiliki keterhubungan dengan komunikasi politik kepresidenan yang dipertahankan sebagai unit analisis. Selanjutnya, setiap kategori dibandingkan antardokumen melalui teknik *cross-checking* agar diperoleh pola diskursif yang konsisten sekaligus meminimalkan kemungkinan bias interpretasi selama proses analisis berlangsung.

Pemaknaan terhadap data dilakukan menggunakan model *Critical Discourse Analysis* Norman Fairclough yang dioperasionalkan melalui tiga tahapan analisis, yaitu analisis teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Ketiga tahapan tersebut tidak diterapkan secara terpisah, tetapi digunakan secara berulang untuk menelusuri hubungan antara pilihan bahasa, proses produksi dan sirkulasi wacana, serta konteks sosial-politik yang melatarbelakanginya. Keabsahan temuan diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan isi pidato resmi Presiden Amerika Serikat, dokumen kebijakan pemerintah, pemberitaan media internasional, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan sehingga interpretasi tidak bertumpu pada satu jenis data. Hasil akhir disusun secara interpretatif dengan menghubungkan pola-pola diskursif yang konsisten ke dalam perspektif Michel Foucault sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana retorika kepresidenan memproduksi pengetahuan, membentuk legitimasi kekuasaan, dan memengaruhi konstruksi realitas geopolitik dalam komunikasi politik internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Bagian ini menyajikan temuan empiris yang diperoleh melalui analisis terhadap dokumen pidato resmi Presiden Amerika Serikat mengenai Iran, pemberitaan media internasional, dan dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan dinamika geopolitik internasional. Seluruh dokumen dibaca secara berulang untuk mengidentifikasi pola narasi, pilihan diksi, representasi aktor, serta kecenderungan pesan yang muncul secara konsisten pada berbagai sumber. Penyajian temuan difokuskan pada deskripsi data empiris sehingga belum memuat penafsiran konseptual yang berkaitan dengan perspektif *power/knowledge*, *regime of truth*, maupun kerangka analitis lainnya. Untuk memberikan gambaran mengenai komposisi data yang dianalisis, karakteristik dokumen penelitian terlebih dahulu dirangkum pada Tabel 1 sebelum uraian mengenai tema-tema yang muncul selama proses analisis disampaikan.

Tabel 1. Karakteristik Data Penelitian

No Sumber Data	Jenis Dokumen	Waktu Publikasi	Fokus Informasi
1 Reuters	Berita internasional	13 Februari 2026	Pernyataan Presiden AS mengenai Iran dan strategi negosiasi
2 ANTARA News	Berita internasional	14 Februari 2026	Pernyataan mengenai mobilisasi armada militer Amerika Serikat
3 Euronews	Berita internasional	13 Februari 2026	Pernyataan mengenai perubahan rezim di Iran
4 Ynet News	Berita internasional	13 Februari 2026	Pernyataan mengenai kemungkinan tercapainya kesepakatan diplomatik
5 Dokumen pidato resmi Presiden AS	Dokumen resmi	Periode penelitian	Pernyataan resmi mengenai hubungan Amerika Serikat dan Iran

Keragaman dokumen yang tercantum pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa data penelitian tidak bersumber dari satu jenis publikasi, melainkan menggabungkan dokumen resmi pemerintah dan pemberitaan media internasional yang memiliki cakupan pembaca berbeda. Variasi sumber tersebut memungkinkan penelusuran terhadap kemunculan narasi yang sama pada ruang komunikasi yang berlainan tanpa mengubah fokus kajian pada retorika Presiden Amerika Serikat mengenai Iran. Keseluruhan dokumen kemudian dikelompokkan menurut kesamaan isi dan fokus komunikasi sehingga setiap pernyataan dapat ditempatkan ke dalam kategori yang memiliki karakteristik serupa. Proses pengelompokan tersebut menjadi dasar penyusunan tema-tema empiris yang dirangkum pada Tabel 2.

Pola-pola yang muncul selama proses *coding* selanjutnya diringkas ke dalam beberapa tema utama agar hubungan antardata lebih mudah diamati. Penyusunan kategori dilakukan melalui pengelompokan kutipan yang memiliki kesamaan makna, konteks, dan orientasi pesan sehingga setiap tema merepresentasikan kecenderungan yang berulang pada berbagai dokumen. Ringkasan ini berfungsi sebagai jembatan antara data mentah dengan uraian empiris tanpa memasukkan penjelasan teoritis mengenai makna atau implikasinya. Susunan tema yang diperoleh selama analisis disajikan secara ringkas pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Ringkasan Temuan Penelitian

No Kutipan/Isi Pernyataan	Tema Temuan	Indikator yang Ditemukan
1 "Iran sulit diajak bicara..."	Narasi ancaman	Penyebutan Iran sebagai aktor yang sulit diajak bernegosiasi
2 "Kita punya armada besar yang bergerak ke sana..."	Demonstrasi kekuatan	Penyampaian kesiapan militer Amerika Serikat
3 "Perubahan rezim di Iran akan menjadi hal terbaik..."	Representasi aktor	Penyebutan perubahan rezim sebagai alternatif penyelesaian
4 "Jika kita tidak mencapai kesepakatan..."	Ketidakpastian diplomatik	Pernyataan bersifat kondisional mengenai hubungan bilateral

No Kutipan/Isi Pernyataan	Tema Temuan	Indikator yang Ditemukan
5 Respons berbagai media internasional	Resonansi internasional	Munculnya perhatian media terhadap implikasi regional dan global

Lima tema yang dirangkum pada Tabel 2 memperlihatkan adanya kemunculan pola komunikasi yang berulang pada dokumen yang dianalisis, yaitu narasi ancaman, demonstrasi kekuatan, representasi aktor, ketidakpastian diplomatik, dan resonansi internasional. Masing-masing tema dibentuk melalui pengelompokan kutipan yang memiliki karakteristik serupa sehingga setiap kategori tetap merujuk pada data empiris yang sama. Selain memperlihatkan konsistensi kemunculan pesan dalam berbagai dokumen, ringkasan tersebut juga memudahkan penelusuran hubungan antara kutipan dan indikator yang menyertainya. Uraian mengenai keterkaitan antartema, proses pembentukan makna, serta relevansinya dengan perspektif analitis penelitian disampaikan secara khusus pada bagian pembahasan agar pemisahan antara penyajian hasil empiris dan interpretasi konseptual tetap terjaga.

Pembahasan

Retorika kepresidenan dalam hubungan Amerika Serikat dan Iran memperlihatkan bahwa bahasa politik tidak pernah hadir sebagai medium yang netral, melainkan sebagai ruang tempat realitas geopolitik diproduksi, dipertahankan, dan dinegosiasikan secara terus-menerus. Analisis terhadap dokumen menunjukkan bahwa pilihan diksi mengenai ancaman, stabilitas kawasan, dan kesiapan penggunaan kekuatan militer membangun kerangka interpretasi tertentu yang mengarahkan perhatian publik internasional pada satu cara pandang terhadap Iran. Yang menarik bukan sekadar isi pernyataannya, melainkan kemampuan retorika tersebut mengondisikan cara berbagai aktor menerima definisi mengenai siapa yang dianggap sebagai ancaman dan siapa yang memperoleh legitimasi untuk bertindak. Perspektif Michel Foucault membantu menjelaskan dinamika tersebut karena diskursus bekerja melalui relasi *power/knowledge*, ketika bahasa bukan hanya merefleksikan realitas, tetapi sekaligus menghasilkan pengetahuan yang kemudian diterima sebagai dasar bagi tindakan politik. Dalam konteks ini, temuan penelitian memperlihatkan perluasan ruang kerja konsep tersebut ke ranah komunikasi politik internasional, melampaui praktik kekuasaan domestik yang lebih banyak dibahas dalam penelitian Aini dan Putra (2026). Pada saat yang sama, argumentasi Mahendra dan Herawati (2025) mengenai kemampuan Analisis Wacana Kritis dalam mengungkap representasi sosial memperoleh dimensi baru karena retorika kepresidenan ternyata tidak hanya membentuk persepsi masyarakat suatu negara, tetapi juga mengonstruksi orientasi geopolitik lintas negara melalui legitimasi yang melekat pada otoritas Presiden Amerika Serikat.

Kapasitas bahasa dalam menghasilkan legitimasi menjadi semakin tampak ketika retorika kepresidenan dipahami sebagai mekanisme pembentukan *regime of truth*. Pernyataan Presiden Amerika Serikat mengenai Iran tidak berhenti sebagai ekspresi kebijakan luar negeri, melainkan berkembang menjadi rujukan yang memengaruhi cara media internasional, institusi politik, dan negara lain menginterpretasikan dinamika konflik di Timur Tengah. Proses tersebut memperlihatkan bahwa kebenaran politik tidak muncul secara alamiah, tetapi dikonstruksi melalui sirkulasi diskursus yang memperoleh pengakuan karena berasal dari aktor yang memiliki otoritas global. Sudut pandang ini memberikan penjelasan yang lebih luas dibandingkan uraian Ouyang dan Morgan (2023) yang menitikberatkan retorika presiden sebagai instrumen pendukung kebijakan luar negeri, karena hasil penelitian menunjukkan

bahwa legitimasi telah dibangun bahkan sebelum kebijakan diwujudkan dalam tindakan diplomatik. Di sisi lain, temuan Jha dan Kumar (2023) mengenai strategi linguistik dalam komunikasi politik global memperoleh penguatan empiris melalui penelitian ini, namun dengan penekanan bahwa struktur bahasa tidak hanya memengaruhi persepsi khalayak, melainkan juga menentukan batas-batas pengetahuan yang dianggap sah dalam percakapan geopolitik internasional. Dengan demikian, *regime of truth* bukan sekadar konsep teoritis, tetapi tampak bekerja secara konkret melalui retorika kepresidenan yang mengarahkan orientasi politik global terhadap konflik Amerika Serikat dan Iran.

Pembacaan terhadap data juga memperlihatkan bahwa proses subjektivasi tidak hanya berlangsung pada individu atau kelompok sosial, melainkan dapat terjadi pada level negara melalui konstruksi diskursif yang terus direproduksi. Iran secara konsisten diposisikan sebagai representasi ancaman terhadap stabilitas kawasan, sedangkan Amerika Serikat membangun identitas sebagai aktor yang memiliki legitimasi moral dan politik untuk menentukan arah penyelesaian konflik. Identitas tersebut tidak lahir karena karakter intrinsik masing-masing negara, tetapi dibentuk melalui praktik komunikasi yang mengulang narasi tertentu hingga memperoleh penerimaan luas dalam ruang publik internasional. Penjelasan ini memperluas argumentasi Rumaf et al. (2025) mengenai reproduksi kekuasaan dalam pidato politik karena subjektivasi yang ditemukan pada penelitian ini tidak berhenti pada pembentukan identitas masyarakat domestik, melainkan bergerak menuju pembentukan identitas geopolitik antarnegara. Kajian Trisnaningtyas dan Anshori (2026) mengenai retorika kepemimpinan juga memperoleh konteks baru, sebab legitimasi yang dibangun melalui pidato presiden ternyata tidak hanya mengonsolidasikan dukungan internal, tetapi sekaligus memengaruhi cara komunitas internasional mendefinisikan posisi setiap aktor dalam konflik. Interpretasi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi politik internasional bekerja melalui proses kategorisasi simbolik yang secara perlahan membentuk struktur relasi kekuasaan dalam sistem global.

Aspek lain yang muncul dari analisis adalah bagaimana retorika kepresidenan memelihara ketidakpastian sebagai bagian dari strategi komunikasi politik, bukan semata-mata sebagai konsekuensi situasi konflik. Pernyataan yang membuka kemungkinan penggunaan kekuatan militer sekaligus menawarkan peluang negosiasi menciptakan ruang interpretasi yang berbeda bagi berbagai negara sehingga respons diplomatik berkembang dalam kondisi yang tidak sepenuhnya pasti. Ketidakjelasan tersebut justru memperlihatkan efektivitas diskursus sebagai instrumen kekuasaan karena aktor lain terdorong menyesuaikan strategi politiknya terhadap berbagai kemungkinan yang diproduksi melalui bahasa. Perspektif sekuritisasi yang dijelaskan Rachmat (2023) membantu menjelaskan bagaimana ancaman dibangun melalui narasi politik, tetapi hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa mekanisme tersebut berlangsung secara lebih kompleks ketika ketidakpastian sendiri dijadikan sumber legitimasi politik dalam hubungan internasional. Sementara itu, temuan Maulana (2026) mengenai *framing* konflik Iran–Israel di media internasional menunjukkan bahwa media berperan memperkuat persepsi ancaman, sedangkan penelitian ini menambahkan bahwa sumber utama konstruksi tersebut berawal dari retorika aktor politik yang kemudian direproduksi oleh berbagai saluran komunikasi global. Oleh karena itu, kecemasan geopolitik yang berkembang tidak dapat dipahami hanya sebagai dampak konflik antarnegara, melainkan sebagai hasil dari praktik diskursif yang secara berkelanjutan membentuk persepsi risiko, mengarahkan ekspektasi politik, dan memengaruhi orientasi hubungan internasional.

Apabila retorika kepresidenan diposisikan sebagai bagian dari praktik komunikasi global, maka dampaknya tidak berhenti pada relasi bilateral antara Amerika Serikat dan Iran,

tetapi bergerak melintasi batas-batas geografis melalui proses reproduksi makna yang berlangsung dalam berbagai ruang komunikasi internasional. Analisis penelitian memperlihatkan bahwa pernyataan Presiden Amerika Serikat menjadi referensi bagi negara-negara lain dalam membaca arah kebijakan luar negeri Washington, sehingga respons politik yang muncul tidak hanya dipengaruhi oleh fakta geopolitik, tetapi juga oleh interpretasi terhadap diskursus yang berkembang. Perspektif *critical geopolitics* menjelaskan bahwa ruang geopolitik dibentuk melalui narasi yang terus diproduksi oleh aktor politik, media, dan institusi internasional, sehingga bahasa memiliki kemampuan mengonstruksi persepsi mengenai stabilitas, ancaman, maupun keseimbangan kekuatan dunia. Dalam konteks tersebut, temuan penelitian tidak sekadar mengonfirmasi argumentasi Ben Messahel (2025) mengenai sentralitas diskursus dalam hubungan internasional, tetapi menunjukkan bagaimana retorika kepresidenan menjadi titik awal terbentuknya resonansi diskursif yang memengaruhi pembacaan geopolitik di Cina, Korea Utara, dan kawasan Timur Tengah. Perspektif yang dikemukakan Prawito et al. (2026) mengenai pengaruh *framing* media terhadap komunikasi diplomatik turut memberikan penjelasan mengapa narasi yang sama dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda di berbagai negara, sementara penelitian Zahra et al. (2025) memperoleh perluasan karena resonansi komunikasi internasional tidak hanya dipengaruhi oleh globalisasi informasi, melainkan juga oleh legitimasi politik yang melekat pada sumber diskursus tersebut.

Perbedaan interpretasi yang muncul di berbagai kawasan memperlihatkan bahwa makna politik senantiasa berada dalam proses negosiasi yang berlangsung secara dinamis. Setiap negara membawa kepentingan strategis, orientasi ideologis, dan pengalaman historis yang berbeda ketika menafsirkan retorika Presiden Amerika Serikat mengenai Iran, sehingga satu narasi dapat menghasilkan respons politik yang tidak seragam. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi politik internasional tidak bekerja melalui mekanisme transmisi pesan secara linear, tetapi melalui interaksi berbagai diskursus yang saling memengaruhi dan saling mengoreksi dalam ruang publik global. Penjelasan Hasna (2023) mengenai komunikasi politik sebagai arena pembentukan citra memberikan dasar untuk memahami proses tersebut, tetapi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa citra politik yang dibangun tidak hanya diarahkan kepada publik domestik, melainkan berkembang menjadi instrumen diplomasi yang memengaruhi konfigurasi hubungan antarnegara. Sejalan dengan itu, Puspadewi et al. (2025) mengaitkan representasi politik dengan relasi kekuasaan dan pembentukan identitas sosial, sedangkan penelitian ini memperluas cakupan analisisnya dengan memperlihatkan bahwa identitas geopolitik negara juga dibentuk melalui negosiasi makna yang berlangsung secara transnasional. Dengan demikian, resonansi diskursif lebih tepat dipahami sebagai proses produksi makna yang terus bergerak mengikuti dinamika politik global daripada sebagai dampak komunikasi yang bersifat satu arah.

Apabila keseluruhan temuan dibaca melalui perspektif Michel Foucault, terlihat bahwa retorika kepresidenan bekerja sebagai praktik *power/knowledge* yang menghubungkan bahasa, pengetahuan, dan kekuasaan dalam satu mekanisme yang tidak dapat dipisahkan. Diskursus mengenai Iran menghasilkan definisi mengenai ancaman, membentuk batas legitimasi tindakan politik, sekaligus menentukan aktor yang memperoleh otoritas untuk mendefinisikan realitas geopolitik. Pada titik inilah penelitian ini memberikan penjelasan yang berbeda dibandingkan kajian-kajian sebelumnya, karena relasi antara pengetahuan dan kekuasaan tidak hanya berlangsung dalam institusi negara atau masyarakat domestik, tetapi juga beroperasi dalam komunikasi politik internasional yang melibatkan berbagai aktor lintas negara. Argumentasi Aini dan Putra (2026) mengenai diskursus sebagai ruang reproduksi kekuasaan memperoleh

pembuktian empiris pada konteks hubungan internasional, sedangkan temuan Mahendra dan Herawati (2025) mengenai representasi dalam Analisis Wacana Kritis diperluas melalui pembacaan bahwa representasi tersebut tidak hanya menghasilkan persepsi sosial, tetapi juga memengaruhi konfigurasi geopolitik global. Dengan kata lain, bahasa politik dalam retorika kepresidenan tidak sekadar merepresentasikan konflik, melainkan menjadi instrumen yang secara aktif membentuk struktur pengetahuan internasional mengenai konflik itu sendiri.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penyatuan perspektif filsafat komunikasi, teori diskursus Michel Foucault, dan *critical geopolitics* dalam menjelaskan retorika kepresidenan sebagai praktik produksi realitas geopolitik. Sintesis tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi politik internasional perlu dipahami sebagai proses pembentukan makna yang berlangsung secara berlapis, mulai dari konstruksi ancaman, pembentukan legitimasi, reproduksi identitas politik, hingga lahirnya resonansi diskursif pada tingkat global. Posisi tersebut sekaligus melampaui kecenderungan penelitian terdahulu yang lebih banyak memusatkan perhatian pada aspek persuasi, *framing*, atau representasi politik secara terpisah, karena penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh proses tersebut saling berkelindan dalam satu mekanisme diskursif yang bekerja melalui bahasa politik. Implikasi teoretisnya membuka ruang pengembangan filsafat komunikasi ke arah pembacaan komunikasi internasional sebagai arena produksi pengetahuan dan relasi kekuasaan, sedangkan implikasi praktisnya mengingatkan bahwa setiap retorika pemimpin negara memiliki potensi membentuk persepsi publik internasional, memengaruhi orientasi kebijakan luar negeri negara lain, serta menggeser konfigurasi geopolitik melalui mekanisme komunikasi yang terus direproduksi. Oleh sebab itu, retorika kepresidenan tidak lagi memadai dipahami sebagai perangkat diplomasi semata, tetapi sebagai praktik diskursif yang memiliki kapasitas membentuk arah perkembangan politik global melalui produksi makna yang berlangsung secara berkesinambungan.

KESIMPULAN

Retorika Presiden Amerika Serikat terhadap Iran memperlihatkan bahwa komunikasi politik dalam konteks hubungan internasional bekerja melampaui fungsi penyampaian kebijakan, yakni sebagai mekanisme yang membentuk cara aktor global memahami ancaman, legitimasi, dan konfigurasi kekuasaan. Perspektif *power/knowledge* Michel Foucault memperlihatkan bahwa bahasa politik memiliki kapasitas untuk memproduksi realitas geopolitik melalui proses diskursif yang terus direproduksi dalam ruang publik internasional, sehingga persepsi mengenai suatu negara tidak terbentuk secara netral, melainkan melalui relasi pengetahuan dan kekuasaan. Sintesis antara *Critical Discourse Analysis*, filsafat komunikasi, dan *critical geopolitics* menjadi kontribusi konseptual utama penelitian ini karena menawarkan cara pandang yang lebih komprehensif dalam menjelaskan keterkaitan antara praktik komunikasi, produksi makna, dan dinamika hubungan internasional. Dengan demikian, retorika kepresidenan dapat dipahami sebagai praktik strategis yang tidak hanya memengaruhi orientasi diplomasi, tetapi juga berperan dalam membentuk struktur pemaknaan yang mengarahkan respons politik pada tingkat global.

Kontribusi penelitian ini memperluas pengembangan kajian filsafat komunikasi dengan menempatkan diskursus sebagai elemen sentral dalam pembentukan realitas politik internasional sekaligus memperkaya studi komunikasi politik dan hubungan internasional melalui pendekatan yang bersifat integratif. Dari sisi praktis, temuan penelitian memberikan landasan analitis bagi akademisi, peneliti, dan pembuat kebijakan untuk memahami bagaimana narasi politik dapat memengaruhi legitimasi kebijakan luar negeri, komunikasi diplomatik,

serta pembentukan opini publik internasional pada situasi konflik geopolitik. Ruang pengembangan penelitian berikutnya terbuka melalui kajian komparatif terhadap retorika pemimpin negara pada berbagai kawasan, analisis *multimodal* yang mengintegrasikan unsur verbal dan visual dalam komunikasi politik, serta penelitian longitudinal yang mengamati perubahan pola diskursus pada periode pemerintahan yang berbeda. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperdalam pemahaman mengenai transformasi komunikasi politik global sekaligus memperkaya pengembangan teori mengenai hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan konstruksi realitas dalam dinamika geopolitik kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, H., & Putra, E. V. (2026). Wacana, pengetahuan, dan kuasa dalam debat Pilkada 2024 di Pesisir Selatan berdasarkan perspektif Foucault. *Jurnal Perspektif*, 9(1), 99–110. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v9i1.1463>
- Alfriandi, D. (2024). Analisis isi framing berita konflik Israel dan Palestina di media Kompas.com. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(2), 643–654. <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/IJHSS/article/view/5469>
- Al-Khawaldeh, N. N., Rababah, L. M., Khawaldeh, A. F., & Banikalef, A. A. (2023). The art of rhetoric: Persuasive strategies in Biden's inauguration speech: A critical discourse analysis. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 1–8. <https://www.nature.com/articles/s41599-023-02450-y>
- Anisa, A. P., & Atman, W. (2025). Estetika sekuritisasi: Peran narasi visual dalam membangun persepsi ancaman global. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 2(3), 155–171. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i3.2050>
- Ben Messahel, A. (2025). Critical geopolitics in international relations: A study in discourse analytical context. 727–711), 2(11, *مجلة القانون والعلوم السياسية*. <https://asjp.cerist.dz/en/article/283087>
- Hasna, S. (2023). Gaya komunikasi dan bentuk konstruksi citra politik anggota legislatif perempuan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Media, Public Relations, dan Komunikasi (IMPRESI)*, 4(1), 12–31. <https://jurnal.uns.ac.id/impresi/article/view/74395>
- Isa, A. (2024). Retorika Prabowo Subianto dalam debat pertama pemilihan presiden 2024. *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 16(2), 143–167. <https://doi.org/10.23917/komuniti.v16i2.5492>
- Jha, A., & Kumar, S. (2023). Linguistic strategies in media discourse analysis of global politics. *IJPM Online*, 2(2), 8–12. <https://doi.org/10.26524/ijpm.2.9>
- Mahendra, B. B., & Herawati, N. R. (2025). Komik digital tentang fenomena politik di Indonesia tahun 2024: Tinjauan analisis wacana kritis (Studi penelitian: Penyampaian pesan politik oleh Komikus Mice Cartoon di Instagram). *Journal of Politic and Government Studies*, 14(2), 557–572. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/49896>
- Marzuki, M., Septiyan, F. D., & Batubara, M. W. A. (2025). Diplomasi dan komunikasi politik internasional. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 5(2), 1209–1221. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i2.1382>
- Maulana, M. (2026). Framing the Iran–Israel conflict and United States involvement in international media: An analysis of Robert N. Entman's model on CNN and Al Jazeera. *Jurnal Audiens*, 7(2). <https://journalaudiens.ums.ac.id/index.php/ja/article/view/790>



- Noval, Y., & Sirangki, H. (2026). Kekuasaan dan wacana sosial: Hoaks sebagai kontrol terhadap kebijakan publik di Indonesia dalam perspektif Michel Foucault. *Masokan: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(1), 1–19. <https://masokan.iakn-toraja.ac.id/index.php/ojsdatamasokan/article/view/278>
- Ouyang, Y., & Morgan, M. A. (2023). Presidential rhetoric and US foreign policy. In *Talking Tough in US Foreign Policy: Executive Actions, National Emergencies, and Economic Sanctions* (pp. 1–16). Springer International Publishing. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-39493-5_1
- Prawito, J., Pratiwi, A., & Halim, B. P. (2026). Framing media nasional dan internasional tentang kesepakatan diplomatik Indonesia China di Laut China Selatan. *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14(1), 18–37. <https://doi.org/10.21009/COMM.036.02>
- Puspadewi, I. D. A., Wastawa, I. W., & Siswadi, G. A. (2025). Perempuan dalam ruang komunikasi politik: Antara representasi, kekuasaan, dan identitas gender. *Vicara: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(4), 14–27. <https://e-journal.samsarainstitute.com/vicara/article/view/202>
- Rachmat, A. N. (2023). Sekuritisasi pengungsi dan migran dari Timur Tengah oleh pemerintah Hungaria tahun 2015–2019. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 19(1), 107–125. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasional/article/view/5891>
- Rumaf, N., Anshori, D. S., Damaianti, V. S., Sastromiharjo, A., & Al Jumroh, S. F. (2025). Representasi kekuasaan dalam teks pidato Presiden Prabowo Subianto: Tinjauan AWK Norman Fairclough. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, 11(2), 2111–2124. <https://e-journal.my.id/onoma/article/view/5790>
- Suryakusuma, D., Putri, R., Rahman, A. D., Haikhal, A., & Ramli, M. R. (2026). Analisis wacana kritis atas representasi rakyat dalam strategi komunikasi politik Kang Dedi Mulyadi. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 1–9. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v5i1.5363>
- Syaf, E. J., Hamid, I., & Sari, E. (2026). Perang narasi asimetris dalam konflik Iran–Amerika Serikat: Analisis komunikasi politik dan propaganda daring. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 12(1), 115–127. <https://doi.org/10.33506/jn.v12i1.5636>
- Syahriar, N. Z. P., & Marzaman, A. P. (2026). Efek heroism dalam komunikasi politik: Konstruksi citra aktor politik melalui insiden berisiko tinggi di wilayah konflik kepentingan. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, 5(2), 450–460. <https://doi.org/10.58192/sidu.v5i2.4919>
- Trisnaningtyas, F., & Anshori, M. (2026). Membangun narasi politik: Studi retorika pidato Presiden Prabowo Subianto. *Jurnal PIKMA: Publikasi Ilmu Komunikasi Media dan Cinema*, 8(2), 306–324. <https://doi.org/10.24076/pikma.2026v8i2.2333>
- Zahra, C. A., Reswari, F. A., Rizqi, M. B., & Widhiandono, D. (2025). QRIS go global: Analisis komunikasi internasional dan tantangan geopolitik digital terhadap hegemoni Amerika. *Relasi: Jurnal Penelitian Komunikasi*, 5(3), 83–100. <https://www.aksiologi.org/index.php/relasi/article/view/2120>